

## KENDALA PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MEMBANGUN KARAKTER PESERTA DIDIK DI DALAM PROSES PEMBELAJARAN

*Pipit Widiatmaka*

*Pusat Studi Demokrasi dan Ketahanan Nasional, LPPM UNS  
pipit.widiatmaka.pkn@gmail.com*

### **Abstract**

*This study has the objective to discuss in depth about the obstacles experienced by Citizenship Education teacher in building the student's character. This type of research is qualitative. Data collection method were literature study and observation. Data were analyzed using interactive data analysis. Civic Education is a lesson that must be given to students from elementary school to college, so it is not denied that Civic Education has a significant in building a good citizen. Basically, Civic Education teacher's responsibility is huge, because the task is not only to build knowledge of civic (civic knowledge), but also to build the skills of civic (civic skills) and character (civic disposition). Up to now, the effort were not yet brought about a maximal result. The reasons were many such as cognitive-heavy, lack of teacher's competence, had teaching the emphasis on civic knowledge, but not civic skills and dispositions.*

**Keywords:** *Civic Education, Character, Students, Learning Process*

### **PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan kunci utama dalam membangun kemajuan suatu bangsa, karena tanpa pendidikan mustahil dapat membangun perekonomian, teknologi, kehidupan sosial dan lain sebagainya. Pembangunan sumber daya manusia menjadi gerakan bersama bagi setiap negara di dunia terutama di Indonesia, sehingga tidak dipungkiri untuk mencapai hal tersebut Indonesia mengimplementasikan pendidikan karakter, karena pendidikan karakter kunci kemajuan bangsa (Muslich, 2011, p. 1). Melalui pendidikan karakter diharapkan mampu mencapai tujuan nasional yang tertuang di dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV, khususnya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendidikan karakter pada dasarnya merupakan ujung tombak membangun kualitas peserta didik, maka pemerintah Indonesia memberi tuntutan kepada seluruh guru untuk mengimplementasikan pendidikan karakter di setiap mata pelajaran maupun

mata kuliah. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa pendidikan nasional memiliki fungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Lebih lanjut, dalam pasal tersebut juga dijelaskan bahwa tujuan pendidikan nasional untuk mengembangkan peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Karakter demokrasi dan toleransi pada dasarnya menjadi tujuan utama pendidikan karakter di Indonesia, mengingat Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman, baik suku, agama, bahasa, ras dan lain sebagainya. Kemajemukan yang ada di Indonesia merupakan suatu kelebihan yang

tidak dimiliki oleh negara lain, namun kelebihan tersebut apabila tidak dikelola dengan baik akan menjadi bumerang bagi bangsa Indonesia sendiri karena negara yang multikultural rentan terhadap konflik, terutama yang berbau SARA. Nasikun (2007, p. 33) mengungkapkan bahwa kemajemukan masyarakat Indonesia paling tidak dapat dilihat dari dua cirinya yang unik yaitu:

*pertama* secara horizontal, ditandai oleh kenyataan adanya kesatuan-kesatuan sosial berdasarkan perbedaan suku bangsa, agama, adat, serta perbedaan kedaerahan, dan *kedua* secara vertikal ditandai oleh adanya perbedaan-perbedaan vertikal antara lapisan atas dan bawah yang cukup tajam. Adanya keberagaman di Indonesia yang sangat mencolok tersebut harus diantisipasi melalui pendidikan karakter yang termuat di setiap mata pelajaran maupun mata kuliah.

Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran dan mata kuliah yang memiliki tanggung jawab yang besar dalam membangun karakter demokrasi dan toleransi peserta didik, karena Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pendidikan moral dan wajib diberikan di setiap jenjang pendidikan dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Apabila mencermati substansi materi yang diajarkan di dalam Pendidikan Kewarganegaraan seharusnya mampu membangun karakter peserta didik, namun selama ini mata pelajaran dan mata kuliah tersebut belum mampu membangun karakter peserta didik sehingga tidak dipungkiri pemuda saat ini sedang mengalami krisis karakter. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan banyaknya tindakan kriminal yang dilakukan oleh pemuda. Data dari Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa pengguna narkoba Indonesia hingga

Oktober 2014 jumlahnya semakin meningkat, pasalnya kurang lebih 4 juta warga Indonesia positif sebagai pengguna narkoba. Penggunaannya mayoritas adalah pemuda, dari 4 juta orang yang positif menggunakan narkoba, 60% berada dalam usia 17-27 tahun (Dradjad, 2015). Tindakan kriminal lain yang dilakukan oleh pemuda khususnya peserta didik, yaitu kasus bentrok antar mahasiswa yang dipicu persoalan suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) yang sering terjadi di Universitas Kanjuruhan Malang. Peristiwa bentrok tersebut terjadi karena kelompok mahasiswa Indonesia timur tersinggung dengan perkataan dan perbuatan kelompok mahasiswa Indonesia tengah, sehingga terjadilah penyerangan kelompok mahasiswa Indonesia timur terhadap kelompok mahasiswa (Herlianto, 2014). Kasus yang lain, pada upacara peringatan HUT RI ke-71 di Kota Palembang, Sumatera Selatan ternoda, karena puluhan pelajar malah terlibat tawuran di depan walikota pada hari Rabu 17 Agustus 2016. Dua kelompok pelajar dari sekolah berbeda tawuran mengenakan bambu runcing. Bahkan, ada bambu runcing terikat bendera merah putih. Mereka saling serang di dekat Plaza Benteng Kuto Besak (BKB), Palembang. Tawuran itu terjadi saat upacara yang dipimpin Walikota Palembang Harnojoyo baru selesai. Saat itu Harnojoyo masih berada di lokasi upacara untuk bersalam-salaman dengan undangan. Dilansir para pelajar tersebut membawa bendera merah-putih yang diikatkan pada bambu runcing. Para pelajar tersebut berjalan menyusuri pinggir plaza BKB hingga sampai ke samping gedung ACC (*Ampera Convention Center*). Para pelajar terlibat tawuran dengan puluhan pelajar lain. Pecahan kaca dari botol pun berserakan di lokasi (Pasinringi, 2016).

Peristiwa-peristiwa tersebut hanyalah sebagian kecil yang dilakukan oleh para pemuda khususnya para peserta didik yang terjadi di beberapa daerah. Fenomena tersebut menjadi pukulan besar bagi Pendidikan Kewarganegaraan, karena Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran dan mata kuliah pendidikan moral yang seharusnya mampu meminimalisir bahkan menghilangkan konflik di kalangan peserta didik.

## **METODE**

Jenis metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan studi pustaka dan observasi. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis data interaktif yang terdiri dari 4 tahap, yaitu 1) pengumpulan data, 2) reduksi data, 3) penyajian data, dan 4) penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Peran Pendidikan Kewarganegaraan**

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki arti sebagai wahana pendidikan karakter yang dibangun untuk membina dan mengembangkan warga negara yang cerdas dan baik dalam jalur pendidikan formal, informal, dan nonformal yang sudah menjadi bagian tujuan dari pendidikan nasional di Indonesia. Harmanto (2013, p. 231)) memaparkan bahwa “Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peranan yang sangat penting dalam menumbuhkan kembangkan pola pikir, sikap dan perilaku rukun, damai serta toleran tanpa meninggalkan kebhinekaan yang memang sudah menjadi *given*-nya bangsa Indonesia”. Pengembangan pola pikir, sikap dan perilaku rukun, damai, serta toleransi akan menjadi

antitesis terhadap segala bentuk konflik dan kekerasan. Apabila Pendidikan Kewarganegaraan di era sekarang mampu menjalankan peranan tersebut, maka Pendidikan Kewarganegaraan adalah satu-satunya mata pelajaran atau mata kuliah yang dapat mencapai tujuan nasional.

Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun peradaban di Indonesia khususnya membangun karakter bangsa memiliki tujuan yang beragam demi tercapainya tujuan nasional, sehingga tidak dipungkiri Pendidikan Kewarganegaraan adalah pembelajaran yang wajib diberikan di setiap jenjang pendidikan, baik sekolah dasar, menengah maupun di perguruan tinggi. Ubedillah dan Rozak (2013) mengungkapkan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana pembangunan karakter bangsa memiliki tujuan antara lain sebagai berikut.

1. Membentuk kecakapan partisipatif warga negara yang bermutu dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
2. Menjadikan warga negara Indonesia yang cerdas, aktif, kritis, dan demokratis, namun tetap memiliki komitmen menjaga persatuan dan integritas bangsa
3. Mengembangkan kultur demokrasi yang berkeadaban, yaitu kebebasan, persamaan, toleransi, dan tanggung jawab.

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran dan posisi yang penting dalam membangun karakter bangsa, sehingga Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tanggung jawab yang besar dalam mencapai tujuan nasional khususnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada dasarnya peran untuk membangun karakter bangsa tidak hanya tugas pendidikan kewarganegaraan saja, namun juga tugas mata pelajaran atau mata kuliah yang lain, tetapi pendidikan

kewarganegaraan memiliki beban moral yang paling besar karena pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan moral bangsa.

Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun warga negara yang baik mengembangkan tiga kompetensi yaitu pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*) dan karakter (*civic disposition*). Syarat utama untuk menjadi warga negara yang baik harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan karakter yang berdasarkan Pancasila. Apabila ketiga kompetensi dimiliki oleh setiap warga negara, maka secara langsung maupun tidak langsung warga tersebut adalah individu yang berkompeten, berkomitmen, dan memiliki kepercayaan diri.

Pendidikan Kewarganegaraan dapat membangun karakter peserta didik dengan baik dan maksimal, apabila Pendidikan Kewarganegaraan dalam implementasinya bersandikan empat pilar yang tertuang di dalam laporan Komisi Internasional untuk UNESCO (Komalasari, 2008, p. 744) tentang pendidikan untuk abad XXI, yaitu

1. *Learning to know* (belajar untuk mengetahui), yakni memperoleh instrumen-instrumen pengertian.
2. *Learning to do* (belajar untuk berbuat), yaitu mampu bertindak secara kreatif di lingkungannya.
3. *Learning to live together* (belajar untuk hidup bersama), yaitu berperan serta dan bekerja sama dengan orang lain dalam semua kegiatan manusia.
4. *Learning to be* (belajar untuk menjadi seorang), yaitu mampu mengembangkan kepribadiannya lebih baik dan bertindak dengan otonomi, keputusan dan tanggung jawab pribadi yang lebih besar.

Pendidikan Kewarganegaraan pada dasarnya mampu untuk mengimplementasikan empat pilar tersebut dengan baik, namun selama ini memiliki

beberapa kendala sehingga tujuan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan belum bisa dicapai dengan maksimal. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peranan yang sangat besar dalam menghadapi permasalahan di Indonesia khususnya di dunia pendidikan. Budimansyah (2010, p. 143) mengungkapkan bahwa peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam menghadapi permasalahan pendidikan di Indonesia adalah sebagai berikut.

1. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai program kurikuler di lembaga pendidikan formal (sekolah/ perguruan tinggi) maupun *non-formal* (luar sekolah), yang berperan sebagai wahana pemuliaan dan pemberdayaan anak dan pemuda sesuai dengan potensinya agar menjadi warga negara yang cerdas dan baik (*smart and good citizen*).
2. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai gerakan sosio-kultural kewarganegaraan yang berperan sebagai wahana aktualisasi diri warga negara baik secara perorangan maupun kelompok sesuai dengan hak, kewajiban, dan konteks sosial budaya, melalui partisipasi aktif secara tegas dan bertanggung jawab.
3. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai program pendidikan politik kebangsaan bagi para penyelenggara negara, anggota dan pimpinan organisasi sosial dan organisasi politik yang dikemas dalam berbagai bentuk pembinaan pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*), dan kebajikan kewarganegaraan (*civic disposition*) yang mengacu pada prinsip konseptual-pedagogis untuk mengembangkan daya nalar (*state of mind*), bukan wahana indoktrinasi politik, sebagai suatu proses pencerdasan.

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran yang sentral dalam membangun kualitas pendidikan di Indonesia, meskipun selama ini memiliki kendala dalam proses implementasi. Kendala yang dialami pendidikan kewarganegaraan selama ini

adalah *pertama*, pemerataan guru atau pendidik di setiap daerah, karena di daerah pinggiran seperti Kalimantan Utara, Papua dan daerah lain masih kekurangan guru. *Kedua*, kualitas guru atau pendidik yang belum memiliki 4 kompetensi (profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian), metode pembelajaran yang kurang kreatif (selalu menggunakan metode ceramah). Apabila kendala tersebut dapat diantisipasi, maka pendidikan di Indonesia dapat membangun sumber daya manusia para pemuda atau peserta didik, sehingga dunia akan mengakui bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar bukan karena sumber daya alamnya, melainkan karena sumber daya manusianya.

### **Pendidikan Kewarganegaraan Masih Dominan Aspek Kognitif**

Sejak Orde Lama, kemudian Orde Baru hingga pasca reformasi Pendidikan Kewarganegaraan belum menunjukkan peran optimal dalam membangun karakter bangsa, sehingga Pendidikan Kewarganegaraan seringkali menuai kritik dari berbagai pihak di kalangan akademisi, pemerintah maupun masyarakat awam. Di sisi lain, usaha pemerintah sejak mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan menggunakan istilah *Civics*, selalu berusaha agar Pendidikan Kewarganegaraan mampu membangun pengetahuan, keterampilan dan karakter peserta didik, namun hingga saat ini belum menunjukkan hasil yang maksimal. Pada tahun 1962 pelajaran *Civics* masih menggunakan indoktrinasi dan hanya mampu membangun pengetahuan peserta didik. Pada tahun itu istilah *Civics* berubah menjadi Kewargaan Negara (Wuryandani, Fathurrohman, & Djaya, 2012, p. 2). Fenomena ini hanya salah satu contoh bahwa Pendidikan Kewarganegaraan di era Orde Lama yang mengedepankan aspek kognitif

atau indoktrinasi padahal di masa itu Presiden berpesan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk “*nation and character building*”.

Pasca jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, program P-4 ternyata dihapus di dalam kurikulum pendidikan, karena program tersebut hanya digunakan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaan. Materi Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) yang tercantum di dalam Tap MPR II/MPR/1978 dicabut setelah keluarnya Tap MPR No. XVIII/MPR/1998, sehingga sejak tahun 1999 pelajaran PPKn secara resmi tidak lagi mengajarkan P4 (Widiatmaka, 2015, p. 2015). Pasca dihapusnya P-4 ternyata Pendidikan Kewarganegaraan tetap belum bisa membangun keterampilan dan karakter peserta didik, meskipun kurikulum dan penggunaan istilah selalu berganti. Pendidikan Kewarganegaraan pasca reformasi juga mengalami permasalahan yang sama, meskipun kurikulum pendidikan nasional selalu mengalami perubahan masih tetap mengedepankan aspek kognitif. Winarno (2013, p. 13) menuturkan beberapa perkembangan penggunaan istilah Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia antara lain sebagai berikut.

1. Kewarganegaraan tahun 1957
2. *Civics* sebagai pengganti Kewarganegaraan tahun 1961
3. Pendidikan Kewargaan Negara tahun 1968
4. Pendidikan Moral Pancasila (PMP) tahun 1975 dan 1984
5. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) tahun 1994
6. Kewarganegaraan (*Civic*) tahun 2004 (uji coba kurikulum berbasis kompetensi), dan
7. Pendidikan Kewarganegaraan tahun 2006 (Permendiknas No. 22 Tahun 2006)

Di jenjang pendidikan dasar dan menengah hingga saat ini (tahun 2016) menggunakan

istilah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), sedangkan di jenjang pendidikan tinggi yang merupakan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK) menggunakan istilah Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). Mengingat banyak peserta didik yang bersikap apatis terhadap Pancasila, maka Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK) ditambah dengan mata kuliah Pendidikan Pancasila.

Kendala yang dialami Pendidikan Kewarganegaraan masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya yaitu masih mengedepankan aspek kognitif, sehingga tujuan untuk menciptakan peserta didik yang kritis dan bertanggung jawab masih belum terealisasi. Berdasarkan pengamatan penulis ketika mengajar Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan Kewarganegaraan, peserta didik beranggapan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan adalah pembelajaran yang membosankan karena selalu mengedepankan teori dan tidak aplikatif. Bahkan sebagian besar peserta didik beranggapan bahwa mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata kuliah formalitas dan hanya sebagai syarat untuk kelulusan saja, sehingga anggapan tersebut memunculkan suatu kesimpulan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan di mata peserta didik adalah mata pelajaran dan mata kuliah yang tidak penting. Hal ini menjadi pukulan besar bagi guru atau dosen Pendidikan Kewarganegaraan karena mata pelajaran dan mata kuliah yang diampu dianggap tidak penting dan hanya sebagai syarat kelulusan saja.

Fenomena tersebut pada dasarnya menjadi evaluasi bagi pemerintah dan guru maupun dosen yang mengampu mata pelajaran dan mata kuliah tersebut. Kendala ini dapat diantisipasi apabila para pendidik memiliki

kesadaran untuk selalu meningkatkan kualitas dalam mengajar dan bersikap sehingga tujuan pendidikan untuk membangun peserta didik menjadi warga negara yang baik dapat tercapai.

### **Penguasaan Kompetensi Guru PKn Masih Kurang**

Di Indonesia pada dasarnya Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran dan tanggung jawab yang besar demi terbangunnya karakter bangsa, namun selama ini selalu mengalami kendala. Kualitas guru menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh Pendidikan Kewarganegaraan dalam membangun karakter peserta didik, sehingga proses pendidikan karakter di dalam proses pembelajaran menjadi terkendala. Surakhmad (2004, p. 1) mengemukakan bahwa “kekuatan dan mutu pendidikan suatu negara dapat dinilai dengan faktor guru sebagai salah satu indeks utama”. Itulah sebabnya mengapa guru merupakan faktor yang mutlak di dalam pembangunan. Makin bersungguh-sungguh sebuah pemerintahan untuk membangun negaranya, semakin *urgen* kedudukan guru. Kualitas pendidikan di Indonesia ditentukan oleh guru, entah dari segi kualitas maupun pemerataan guru di berbagai wilayah. Di sisi lain, guru Pendidikan Kewarganegaraan juga harus ikut bertanggung jawab apabila kualitas pendidikan di Indonesia semakin menurun, karena Pendidikan Kewarganegaraan adalah mata pelajaran dan mata kuliah yang digadang-gadang mampu memperbaiki moral generasi penerus bangsa.

Pada dasarnya permasalahan yang selama ini melingkupi Pendidikan Kewarganegaraan adalah peran guru dalam pembelajaran di kelas, sehingga tujuan Pendidikan Kewarganegaraan di pendidikan formal belum tercapai dengan maksimal. Guru yang

berkualitas seharusnya memiliki 4 kompetensi yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada Pasal 10 ayat 1 yaitu:

1. Kompetensi pedagogik, yaitu kemampuan guru yang mampu mengelola proses belajar dan mengajar untuk mencairkan suasana di kelas.
2. Kompetensi profesional, yaitu kemampuan guru dalam menguasai materi yang diajarkan kepada peserta didik.
3. Kompetensi sosial, yaitu kemampuan pendidik dalam berinteraksi dengan masyarakat, peserta didik atau komponen masyarakat yang lain.
4. Kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan personal yang harus dimiliki oleh guru untuk menjadi pribadi yang religius, tanggung jawab, memiliki komitmen, berintegritas, jujur dan lain sebagainya.

Empat kompetensi tersebut menjadi pegangan bagi seorang guru khususnya yang mengampu mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, namun saat ini banyak guru yang hanya bisa mengajar saja, tetapi belum bisa menjadi seorang guru yang mampu mendidik dan menginspirasi peserta didik. Berdasarkan pengamatan penulis di lapangan banyak guru yang sudah memiliki kompetensi profesional, mampu menguasai teori-teori materi dalam Pendidikan Kewarganegaraan, namun masih banyak guru yang belum memiliki kompetensi pedagogik, sehingga pembelajaran di kelas peserta didik selalu mengalami kejenuhan atau bosan terhadap mata pelajaran karena metode yang digunakan tidak variatif.

Pembelajaran di kelas, seharusnya guru bukan sebagai sumber belajar yang tahu segalanya, namun selama ini guru merasa seolah-olah mengetahui segalanya sehingga setiap pertanyaan peserta didik yang ditujukan kepada guru selalu dijawab dengan

seenaknya oleh guru (dijawab tanpa dasar yang jelas), meskipun jawabannya salah. Hal tersebut bisa terjadi karena guru takut terlihat malu di depan peserta didik, karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari peserta didik. Sikap yang seharusnya diambil oleh seorang guru apabila tidak mengetahui jawaban dari pertanyaan seorang peserta didik, menawarkan kepada peserta didik lainnya untuk didiskusikan, sehingga terjadilah interaksi antara guru dengan peserta didik dan interaksi antara peserta didik dengan peserta didik.

Guru di Indonesia khususnya yang mengampu mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagian besar kurang memperhatikan peran yang harus dilakukan di dalam pembelajaran tatap muka, sehingga tidak dipungkiri pembelajaran di kelas menjadi kurang efektif karena hanya *transfer of knowledge*. Suwarna (Winarno, 2013, p. 55) mengungkapkan beberapa hasil penelitian tentang kelemahan guru PPKn dalam proses pembelajaran, antara lain sebagai berikut.

1. Guru PPKn tidak bertindak sebagai fasilitator, tetapi lebih banyak bertindak dan berpotensi sebagai satu-satunya sumber belajar.
2. Guru PPKn cenderung bertindak sebagai pemberi bahan pembelajaran dan belum bertindak sebagai pembelajar.
3. Guru PPKn belum dapat melakukan pengelolaan kelas secara optimal, tetapi lebih banyak bertindak sebagai penyaji informasi dari buku.
4. Guru PPKn belum berkiprah secara langsung terencana membentuk kemampuan berpikir dan sistem nilai peserta didik.
5. Guru PPKn lebih banyak bertindak sebagai pengajar sehingga belum banyak bertindak sebagai panutan.
6. Guru PPKn belum secara optimal memberikan kemudahan bagi para peserta didik dan bertindak sebagai motivator dalam belajar.

Kendala-kendala yang dialami Pendidikan Kewarganegaraan tersebut seharusnya menjadi bahan introspeksi bagi setiap guru khususnya yang mengampu mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, agar pendidikan di Indonesia menjadi lebih berkualitas. Kualitas pendidikan di suatu negara pada dasarnya dapat diukur dengan kemampuan dan peran guru. Apabila guru di Indonesia tidak memiliki kompetensi sebagai seorang pendidik, maka masa depan bangsa Indonesia tidak menentu, karena pemuda yang diajar oleh guru saat ini hanya mampu menguasai pengetahuan saja dan belum memiliki keterampilan dan karakter yang berdasarkan Pancasila.

#### **Metode Pembelajaran yang Membosankan**

Pembelajaran merupakan proses untuk membentuk pengetahuan, keterampilan dan karakter peserta didik, dalam proses tersebut seorang guru maupun dosen memerlukan persiapan agar dapat mengorganisir di dalam proses pembelajaran sehingga pada akhirnya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Usman (2005, p. 4) mengungkapkan bahwa “proses belajar mengajar merupakan suatu proses yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan peserta didik atas dasar hubungan timbal balik yang berlangsung dalam situasi edukatif untuk mencapai tujuan tertentu”. Interaksi atau hubungan timbal balik antara guru dan peserta didik itu merupakan syarat utama bagi berlangsungnya proses belajar-mengajar. Interaksi dalam peristiwa belajar-mengajar mempunyai arti yang lebih luas, tidak sekadar hubungan antara guru dengan peserta didik, tetapi berupa interaksi edukatif. Hal ini bukan hanya penyampaian pesan berupa materi pelajaran, melainkan penanaman sikap dan nilai pada diri peserta didik yang sedang belajar.

Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan perlu memperhatikan komponen-komponen pengaturan guru dan peserta didik, sehingga peserta didik mampu menguasai kompetensi pokoknya, yaitu *civic knowledge*, *civic skill*, dan *civic disposition*. Untuk menanamkan tiga kompetensi tersebut, maka seorang guru harus memiliki strategi dalam proses belajar dan mengajar, karena tanpa strategi seorang guru akan kesulitan untuk membangun ketiga kompetensi tersebut. Strategi pembelajaran selama ini menjadi kendala sebagian besar guru di Indonesia, karena metode yang digunakan selalu monoton, kurang kreatif dan variatif, sehingga kolaborasi antar metode pembelajaran di kelas sangat jarang ditemui.

Pemilihan metode pembelajaran merupakan salah satu strategi pembelajaran agar tujuan pembelajaran tersebut dapat tercapai, namun selama ini guru selalu menggunakan metode ceramah yang hanya *transfer of knowledge*, sehingga keterampilan dan karakter peserta didik belum bisa dibangun dengan maksimal. Padahal peran guru tidak hanya bertugas mentransfer ilmu pengetahuan saja, melainkan juga memberikan bimbingan sehingga peserta didik mempunyai jiwa dan watak yang baik, mampu membedakan mana yang baik dan buruk serta yang halal dan haram (Sagala, 2003, p. 13). Pada dasarnya kelemahan Pendidikan Kewarganegaraan selama ini selalu menggunakan metode ceramah, sehingga selalu mengedepankan aspek kognitif saja, seperti yang diungkapkan oleh Soemantri (2001, p. 304), yaitu metode pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang dulu bernama *civic* masih menggunakan teknik mengajar yang tradisional, yaitu menggunakan metode ceramah dan indoktrinasi. Metode ceramah adalah metode

yang membosankan dalam proses pembelajaran, karena metode tersebut tidak memberikan kesempatan peserta didik untuk berinteraksi dengan teman dan guru.

Setiap metode pembelajaran selalu memiliki kelebihan dan kelemahan, begitu juga dengan metode ceramah, namun kelebihan yang dimiliki metode ceramah sangat sulit untuk mencapai tujuan pembelajaran. Abdurrahman (2010, p. 83) mengungkapkan beberapa kelebihan metode ceramah, antara lain sebagai berikut.

1. Ceramah merupakan metode yang murah dan mudah untuk dilakukan. Murah maksudnya, ceramah tidak memerlukan biaya untuk kegiatan pembelajaran, karena tidak menggunakan media dan peralatan-peralatan, sedangkan mudah maksudnya metode ceramah hanya menggunakan suara guru sehingga tidak perlu persiapan yang matang.
2. Ceramah dapat menyajikan materi pelajaran yang luas. Materi yang banyak dapat dirangkum dan dapat dijelaskan dalam waktu yang singkat.
3. Ceramah dapat memberikan pokok-pokok materi yang dapat ditonjolkan. Guru dapat mengatur pokok-pokok materi yang mana yang perlu ditekankan untuk peserta didik.
4. Ceramah dapat membuat guru mengontrol keadaan kelas karena sepenuhnya kelas menjadi tanggung jawab guru yang memberikan ceramah.
5. Organisasi kelas dengan menggunakan ceramah dapat diatur menjadi sederhana. Guru tidak perlu mengatur tempat duduk lagi untuk peserta didik dan tinggal menempati tempat duduknya saja.

Kelebihan yang dimiliki metode ceramah menunjukkan hanya mempermudah guru dalam mempersiapkan diri dan mempermudah guru dalam mengatur materi, sehingga metode tersebut dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sangat sulit untuk membentuk peserta didik menjadi warga negara yang baik. Di samping

beberapa kelebihan metode tersebut, metode ceramah juga memiliki berbagai kelemahan. Kelemahan metode ceramah diidentifikasi Sanjaya (2010, pp. 148–149) antara lain sebagai berikut.

1. Materi yang dapat dikuasai peserta didik sebagai hasil dari ceramah akan terbatas pada apa yang dikuasai guru.
2. Ceramah yang tidak disertai dengan peragaan dapat mengakibatkan terjadinya verbalisme.
3. Guru yang kurang memiliki kemampuan yang bertutur baik, ceramah sering dianggap sebagai metode yang membosankan.
4. Melalui ceramah sangat sulit untuk mengetahui apakah seluruh siswa sudah mengerti apa yang dijelaskan atau belum.

Metode ceramah dalam proses pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan masih sangat kurang berarti dalam mencapai tujuan pembelajaran, sehingga diperlukan kolaborasi antar metode pembelajaran. Keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran yang menggunakan metode ini masih sangat kurang, di dalam metode tersebut interaksi sangat jarang ditemui. Fenomena ini menjadi penghalang untuk memunculkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik, sehingga tidak dipungkiri Indonesia selalu melahirkan pemuda yang kurang kreatif.

## SIMPULAN

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan proses pembelajaran yang berusaha untuk membangun *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic disposition* peserta didik, sehingga tujuan untuk membentuk warga negara yang baik dapat terwujud. Pendidikan Kewarganegaraan pada dasarnya ujung tombak untuk membangun karakter bangsa peserta didik, karena Pendidikan Kewarganegaraan adalah pendidikan moral

yang mengajarkan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia yang tertuang di dalam Pancasila. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peranan yang sangat penting dalam menumbuhkan pola pikir, sikap dan perilaku warga negara. Di sisi lain, Pendidikan Kewarganegaraan adalah solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang menyelubungi pendidikan di Indonesia, yaitu kurang maksimalnya dalam membangun karakter peserta didik. Meskipun Pendidikan Kewarganegaraan merupakan ujung tombak dalam membangun karakter bangsa, namun di dalam implementasinya sering mengalami kendala sehingga tujuan Pendidikan Kewarganegaraan tidak tercapai.

Kendala yang dialami Pendidikan Kewarganegaraan di dalam proses pembelajaran selama ini, yaitu selalu menekankan aspek kognitif sehingga karakter peserta didik masih kurang diperhatikan. Kompetensi guru juga menjadi penghalang terbangunnya karakter peserta didik, karena sebagian besar guru di Indonesia belum mampu menguasai 4 kompetensi (pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian) secara menyeluruh. Metode pembelajaran yang digunakan oleh guru di dalam proses pembelajaran yang monoton juga membuat tidak maksimalnya proses pembangunan karakter peserta didik. Fenomena ini menjadi salah satu munculnya permasalahan yang dialami pendidikan di Indonesia, yaitu krisis karakter pemuda sehingga berdampak pada banyak tindakan kriminal yang dilakukan oleh pemuda.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Penyelesaian hasil penelitian ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak mengingat keterbatasan pengetahuan, waktu, dan kemampuan

peneliti. Terima kasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan atas bantuannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, M. (2010). Pendidikan bagi anak berkesulitan belajar. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budimansyah, D. (2010). *Penguatan pendidikan kewarganegaraan untuk membangun karakter bangsa*. Bandung: Widya Aksara Press.
- Dradjad, S. (2015). BNN: Pemuda dan narkoba, lingkaran setan yang mengerikan. Retrieved from <http://kriminalitas.com/bnn-pemuda-dan-narkoba-lingkaran-setan-yang-mengerikan>. 24 Februari 2015.
- Harmanto. (2013). *Pengintegrasian pendidikan antikorupsi dalam pembelajaran pkn sebagai penguatan karakter bangsa. Studi evaluasi dan pengembangan perangkat pembelajaran bermodel pakem di sekolah menengah pertama*. Disertasi. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Herlianto. (2014). Bawa parang dan pedang ratusan mahapeserta didik saling serang. Retrieved from <http://www2.jawapos.com/baca/artikel/1553/bawa-parang-dan-pedang-ratusan-mahasiswa-saling-serang>
- Komalasari, K. (2008). *Pengaruh pembelajaran kontekstual dalam PKn terhadap kompetensi kewarganegaraan siswa SMP*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Muslich, M. (2011). *Pendidikan karakter: Menjawab tantangan krisis multidimensional*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nasikun. (2007). *Sistem sosial Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Pasinringi. (2016). Upacara kemerdekaan ternoda, pelajar bentrok pakai bambu runcing.

- Sagala, S. (2003). *Konsep dan Makna Pembelajaran*. Bandung: Alfabeta.
- Sanjaya, W. (2010). *Strategi pembelajaran berorientasi standar proses pendidikan*. Jakarta: kencana.
- Soemantri, M. N. (2001). *Menggagas pembaharuan pendidikan IPS: menandai 70 tahun usia Prof. Muhammad Numan Somantri, M. Sc., guru besar senior PPS dan FPIPS UPI*. (D. Supriadi & R. Mulyana, Eds.). Bandung: Program Pascasarjana dan FPIPS UPI dengan PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Surakhmad, W. (2004). *Pengantar interaksi mengajar-belajar dasar dan teknik metodologi pengajaran*. Bandung: Tarsito.
- Ubaedillah, A., & Rozak, A. (2013). *Pendidikan kewarga (negara) an; Pancasila, demokrasi, HAM, dan masyarakat madani*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Usman, M. U. (2005). *Menjadi guru profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Widiatmaka, P. (2015). Pendidikan kewarganegaraan sebagai ujung tombak pembangunan karakter bangsa. In *Bunga Rampai Pendidikan: Sumbangsih Pemikiran Anak Bangsa*. Kediri: ARS.
- Winarno. (2013). *Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Isi, strategi dan penilaian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Wuryandani, W., Fathurrohman, & Djaya, W. (2012). *Pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di sekolah dasar*. Yogyakarta: Ombak. Yogyakarta: Ombak.